



SNIA[®]

SEMINAR NASIONAL INTERNAL AUDIT
WHAT'S DRIVING CHANGE
to Stay Ahead of The Curve
for Internal Auditors
in The Coming Years ?

3-4 DESEMBER 2025 | THE STONES HOTEL, BALI



Logos of partner organizations: PLN mobile, PLN, PERTAMINA, and mandiri.





Green Finance, Green Risks: Auditing in the Era of Sustainable Investment

Seminar Nasional Internal Audit (SNIA)

ESG Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bali, 4 Desember 2025

Pembiayaan Hijau di Tengah Risiko Iklim dan Ancaman *Greenwashing*

Climate Risk

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca di bumi yang diakibatkan dari penghasiian emisi (eg. CO2, metana).

Risiko Fisik

Dampak Kronis

- Peningkatan permukaan laut
- Kenaikan suhu rata-rata
- Pengasaman laut

Dampak Akut

- Gelombang panas mematikan
- Banjir
- Kebakaran hutan
- Badai (angin topan, siklon, dan taifun serta curah hujan ekstrem)

Risiko Transisi

- Perubahan kebijakan dan hukum (Harga Karbon, sectoral limit, dll)
- Perubahan teknologi
- Perubahan sentimen pasar

.... Risiko ini mendorong munculnya kebutuhan untuk Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan

Morgan Stanley
Individual Investor Interest in Sustainable Investing Remains Strong
Apr. 30, 2025
Nearly 90% of global individual investors express interest in sustainable investing, citing the desire to support positive outcomes and the potential for competitive returns.

Over 80% of Investors Expect to Increase Allocations to Sustainable Investments: Morgan Stanley Survey

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
NDA GCF National Designated Authority Green Climate Fund Indonesia

GCF Sebagai Sumber Pembiayaan Iklim Berbasis Inovasi

Tentang OJK Fungsi Utama Publikasi Regulasi Statistik Layanan Karir

Publikasi / Siaran Pers / Siaran Pers: OJK Terbitkan Peraturan Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

Siaran Pers: OJK Terbitkan Peraturan Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

Peran BI dalam Keuangan Hijau Kalkulator Hijau Riset terkait Keuangan Hijau

Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia untuk Mendukung Keuangan Hijau

Hingga saat ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan tiga kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan sebagai berikut:

- Pertama, Bank Indonesia memberlakukan kebijakan *Loan-to-Value (LTV)* untuk kredit properti dan *Uang Muka (UM)* untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) berwawasan lingkungan sejak Desember 2019. Melalui kebijakan ini, terdapat perbedaan LTV dan UM minimum untuk pembiayaan produk berwawasan lingkungan dan produk yang tidak berwawasan lingkungan. LTV untuk pembiayaan properti berwawasan lingkungan (*green building*) dapat diberikan hingga sebesar 100%, sedangkan UM untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat ditetapkan hingga 0%, sejalan dengan asesmen dan manajemen risiko yang dilakukan bank sebagai penyalur pembiayaan. LTV dan UM yang lebih longgar berpotensi meningkatkan *demand* dan akses pembiayaan hijau, serta mendukung beralihnya preferensi masyarakat kepada properti dan kendaraan yang berwawasan lingkungan. Harapannya, kebijakan ini dapat mengakselerasi pertumbuhan keuangan hijau, sekaligus mendorong perekonomian tanpa mengabaikan risiko lingkungan.
- Kedua, Bank Indonesia menetapkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) melalui *PBI No.24/S/PM/2022* guna mendukung pembiayaan inklusif dan menunjang SSK yang berkelanjutan. Bank menetapkan target RPIM secara *self-assessment* dan memiliki

.... Lalu, apa itu Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan?

Sustainable Financing



Green Financing

Thresholds are science-based, based on data, go beyond business as usual, and clearly contributes to environmental objective.



Beware of Greenwashing Claims!

Greenwashing: Klaim "Eco-Friendly" yang Menyesatkan dan Ancaman Green Financial Crime

Penyalahgunaan Dana Proyek Lingkungan

Sertifikasi Lingkungan Tidak Valid

Manipulasi Laporan ESG



Social Financing

Directly aim to address or mitigate specific social issues and seek to achieve positive social outcomes, especially for target populations.

Mengidentifikasi Praktik *Greenwashing* dalam Pembiayaan Hijau

Penyalahgunaan Dana Proyek Lingkungan



Perusahaan menggalang dana untuk proyek-proyek yang bertujuan ramah lingkungan, namun **dana tersebut tidak** digunakan sesuai dengan tujuan awal atau **dialihkan ke kegiatan lain yang tidak terkait**.

Sertifikasi Lingkungan Tidak Valid



Produk diberi **label sertifikasi** lingkungan meskipun **tidak memenuhi standar** yang ditetapkan, dan bahkan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang tidak terakreditasi.

Manipulasi Laporan ESG



Perusahaan besar, khususnya yang terdaftar di bursa efek, sering menyampaikan **Laporan Keberlanjutan**. Jika laporan ini **berisi data yang tidak valid** demi menarik perhatian investor yang peduli pada keberlanjutan, maka hal ini dapat merusak integritas laporan tersebut.

Standar & Prinsip Global dalam Pembiayaan Berkelanjutan

Global Standards & Principles

Loan Market Association (LMA)



Green Loan Principles

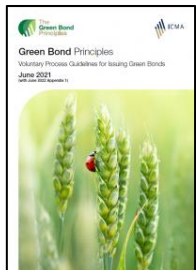


Social Loan Principles



Sustainability-Linked
Loan Principles

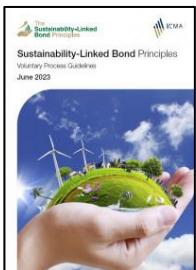
International Capital Market Association (ICMA)



Green Bond
Principles



Social Bond
Principles



Sustainability-Linked
Bond Principles



Social Bond Guidelines

Core
Components

1. Use of Proceeds
2. Process for Project Evaluation and Selection
3. Management of Proceeds
4. Reporting

Use of Proceeds

Eligible Green Projects

- Renewable energy
- Energy efficiency
- Pollution prevention & control
- Environmentally sustainable management of living natural resources and land use
- Terrestrial and aquatic biodiversity
- Clean transportation
- Sustainable water & wastewater management
- Climate change adaptation
- Circular economy adapted products, production technologies and processes
- Green buildings

*Principle allow for the use of complementary definitions, standards and **taxonomies** for determining the environmental sustainability of projects.*

Eligible Social Projects

- Affordable basic infrastructure
- Access to essential services
- Affordable housing
- Food security and sustainable food systems
- Employment generation, and programs designed to prevent and/or alleviate unemployment
- Socioeconomic advancement and empowerment

Target Populations

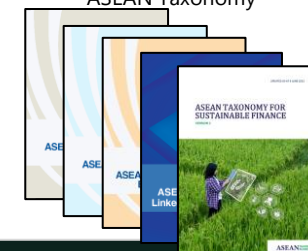
- Living below the poverty line
- Excluded and/or marginalised populations
- People with disabilities
- Migrants and/or displaced persons
- Undereducated
- Underserved
- Unemployed
- Women and/or sexual and gender minorities
- Aging populations and/or vulnerable youths
- Other vulnerable groups

Taxonomies

Global EU Taxonomy



Regional ASEAN Taxonomy



National

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia



Pedoman Klasifikasi Pembiayaan Hijau dan Sosial mengacu pada ketentuan OJK

POJK 51/2017



Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Tujuan

1. Mengatur kewajiban penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan;
2. Mengatur penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (SR)



Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)

"Acuan dalam melakukan pencatatan portofolio pembiayaan/kredit berkelanjutan yang terdiri dari 12 kategori yang diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha berkelanjutan"

Energi Terbarukan	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat & Air	Produk Eco-Efficient	Efisiensi Energi
Pencegahan & Pengendalian Polusi	Transportasi Ramah Lingkungan	Adaptasi Perubahan Iklim	Bangunan Hijau
Pengelolaan Air & Air Limbah Berkelanjutan	Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	Pengelolaan SDA Hayati & Pengelolaan Lahan	Kegiatan UMKM

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)

POJK 18/2023



Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan dapat berupa:

1. EBUS Lingkungan;
2. EBUS Sosial;
3. EBUS Keberlanjutan;
4. Sukuk Wakaf;
5. EBUS Terkait Keberlanjutan;
6. Efek Keberlanjutan lainnya.



Use of Proceeds

7 KUBS

10 KUBL

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya

1. Layanan Infrastruktur Dasar Yang Terjangkau Baik Dari Segi Akses Maupun Harga
2. Akses Terhadap Layanan Esensial
3. Perumahan Yang Terjangkau
4. Penciptaan Lapangan Kerja, Dan Program yang Dirancang Untuk Mencegah Dan/Atau Mengurangi Pengangguran, Termasuk Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Dan Pembiayaan Mikro
5. Ketahanan Pangan Dan Sistem Pangan Berkelanjutan
6. Peningkatan Dan Pemberdayaan Sosio-ekonomi
7. **Kegiatan Usaha Sosial Lainnya**

..kegiatan yang masuk dalam klasifikasi berwawasan hijau/sosial pada **taksonomi yang berlaku** di Indonesia.

Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Landasan Hukum

- UU No 4/2023 P2SK
- RPJPN
- RPJMN
- Perpres 111/2022

Perkembangan Nasional dan International



Presidensi G20 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023 mencapai hasil konkrit antara lain mendorong **transisi energi Indonesia**



ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance version



Diperlukan **upaya konkret pengurangan emisi GRK**

TKBI



TKBI merupakan **klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia** yang mencakup **aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial**. TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* Indonesia.

Scientific dan Credible

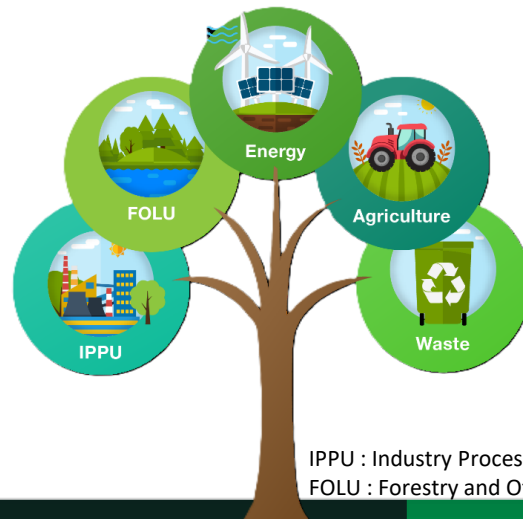
TKBI mempertimbangkan **praktik terbaik** (kebijakan, ilmu pengetahuan,

Interoperable dan Mendukung Kepentingan Nasional

TKBI mempertimbangkan taksonomi yang berlaku pada tataran internasional dan Kawasan (**interoperability**), dalam rangka memfasilitasi transisi Indonesia yang bertahap dan berkeadilan (**just transition**).

Inklusif

TKBI dirancang untuk dapat diterapkan pada berbagai skala pengguna (korporasi/non-UMKM dan UMKM

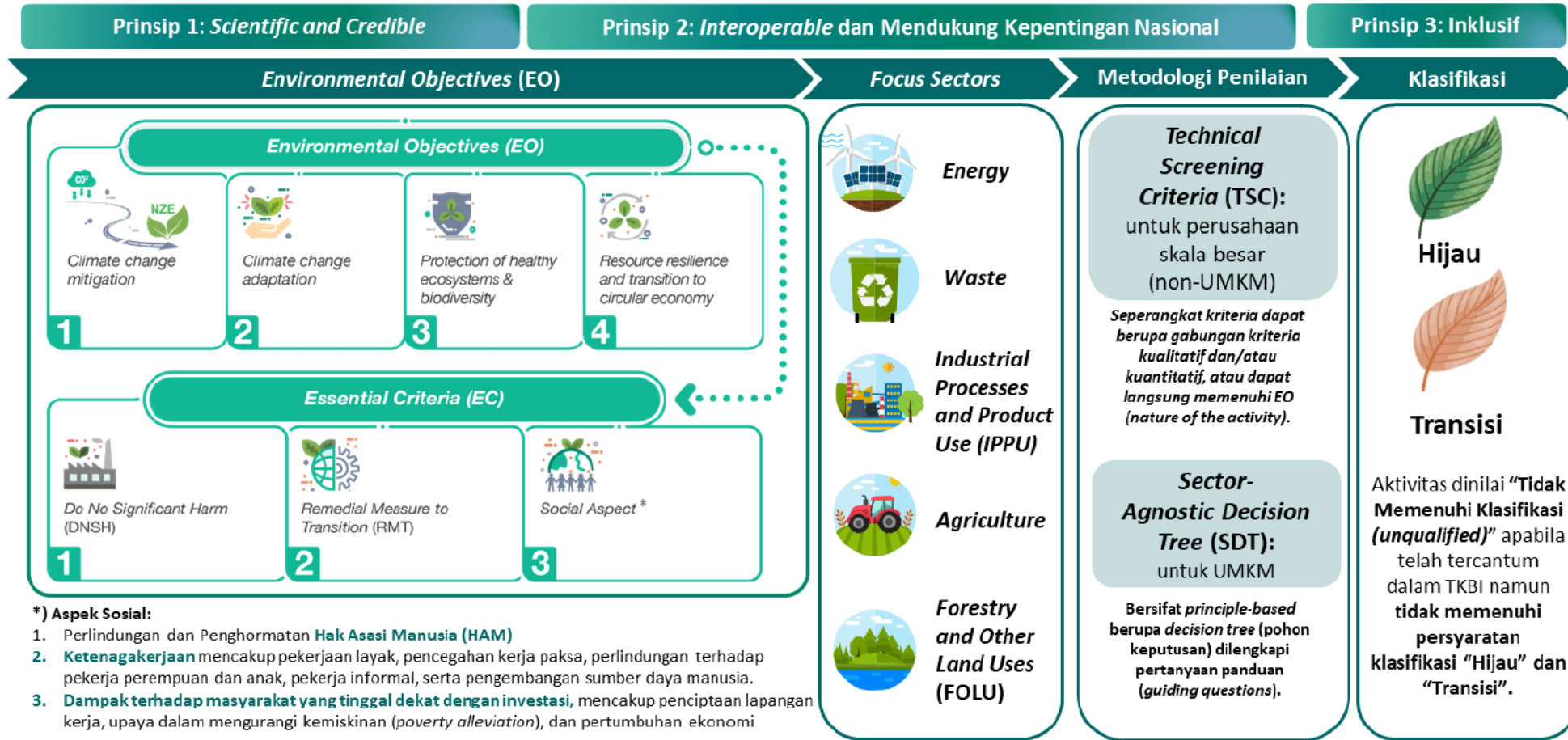


Mandat UU P2SK

- **Komite Keuangan Berkelanjutan**, salah satunya berkoordinasi dalam **menyusun taksonomi berkelanjutan**.
- PUSK, emiten, dan perusahaan publik **menerapkan Keuangan Berkelanjutan** dalam kegiatan usahanya dan menyusun laporan keberlanjutan

Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan
termasuk didalamnya mengatur Komite Keuangan Berkelanjutan dan taksonomi berkelanjutan

IPPU : Industry Process and Product Use
FOLU : Forestry and Other Land Uses



***) Aspek Sosial:**

1. Perlindungan dan Penghormatan **Hak Asasi Manusia (HAM)**
2. **Ketenagakerjaan** mencakup pekerjaan layak, pencegahan kerja paksa, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, pekerja informal, serta pengembangan sumber daya manusia.
3. **Dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat dengan investasi**, mencakup penciptaan lapangan kerja, upaya dalam mengurangi kemiskinan (*poverty alleviation*), dan pertumbuhan ekonomi

	Prinsip Umum	Penjelasan
HIJAU	Sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1.5°C yang sejalan dengan Paris Agreement, termasuk mempertimbangkan target net zero emission Indonesia tahun 2060 (atau lebih awal) dan memenuhi aspek sosial.	Aktivitas yang memenuhi kriteria "Hijau" pada salah satu EO dan seluruh kriteria esensial, yaitu: a) Tidak menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH) bagi EO lainnya. Apabila menyebabkan kerusakan/kerugian maka melakukan aktivitas remediasi/perbaikan (RMT) dan telah memastikan bahwa tidak menyebabkan kerusakan/kerugian bagi EO lainnya; dan b) Memenuhi seluruh aspek sosial.

	Prinsip Umum	Penjelasan
TRANSISI	Aktivitas yang saat ini belum sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu global, belum berada pada jalur net zero emission, namun:	Aktivitas yang memenuhi kriteria "Transisi" pada salah satu EO dan memenuhi sebagian dari EC, yaitu: a) Masih menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH) bagi EO lainnya meskipun telah melakukan aktivitas remediasi/perbaikan (RMT); b) Memiliki rencana perbaikan ke depan; dan c) Memenuhi seluruh aspek sosial.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bergerak menuju klasifikasi "Hijau" dalam jangka waktu tertentu; • Memfasilitasi pengurangan emisi yang signifikan dalam jangka pendek atau menengah dengan batas waktu tertentu; atau • Mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan. dan memenuhi aspek sosial. 	

Apakah proyek sesuai dengan **cakupan aktivitas usaha** pada TKBI?

Use Case 1:

↓ Yes

Use Case 2:

Pembangkit Listrik Tenaga Air

EO 1: Mitigasi Perubahan Iklim	
Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)
Hijau	<p>Apabila memenuhi kriteria 1 atau 2 atau 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan run-off-river; atau Menggunakan waduk dengan power density >4 W/m²; atau Lifecycle emissions dari seluruh fasilitas pembangkit listrik <100 gCO₂e/kWh

Perkebunan Sawit

EO 1: Mitigasi Perubahan Iklim	
Klasifikasi	Technical Screening Criteria (TSC)
Hijau	<p>Aktivitas merupakan Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak dibudidayakan di dalam kawasan hutan:</p> <p>Telah memiliki salah satu dari sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan tingkat nasional atau internasional, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), The Palm Oil Innovation Group (POIG), dll.

↓ Yes

Apakah proyek memenuhi **Do No Significant Harm (DNSH)**?

Do No Significant Harm (DNSH)

- Dokumen Feasibility Study/AMDAL/UKL-UPL/dokumen kajian lingkungan sejenis
- Proper Biru
- Proper Hijau atau dokumen Life Cycle Assessment (LCA)

Yes

Apakah proyek memenuhi aspek sosial berupa **Hak Asasi Manusia (HAM), Ketenagakerjaan, dan Dampak terhadap Masyarakat Sekitar**?

Yes

Hijau

↓ Jika Tidak

Apakah proyek telah memiliki **Rencana Perbaikan** yang akan dilakukan kurun waktu **5 tahun**?

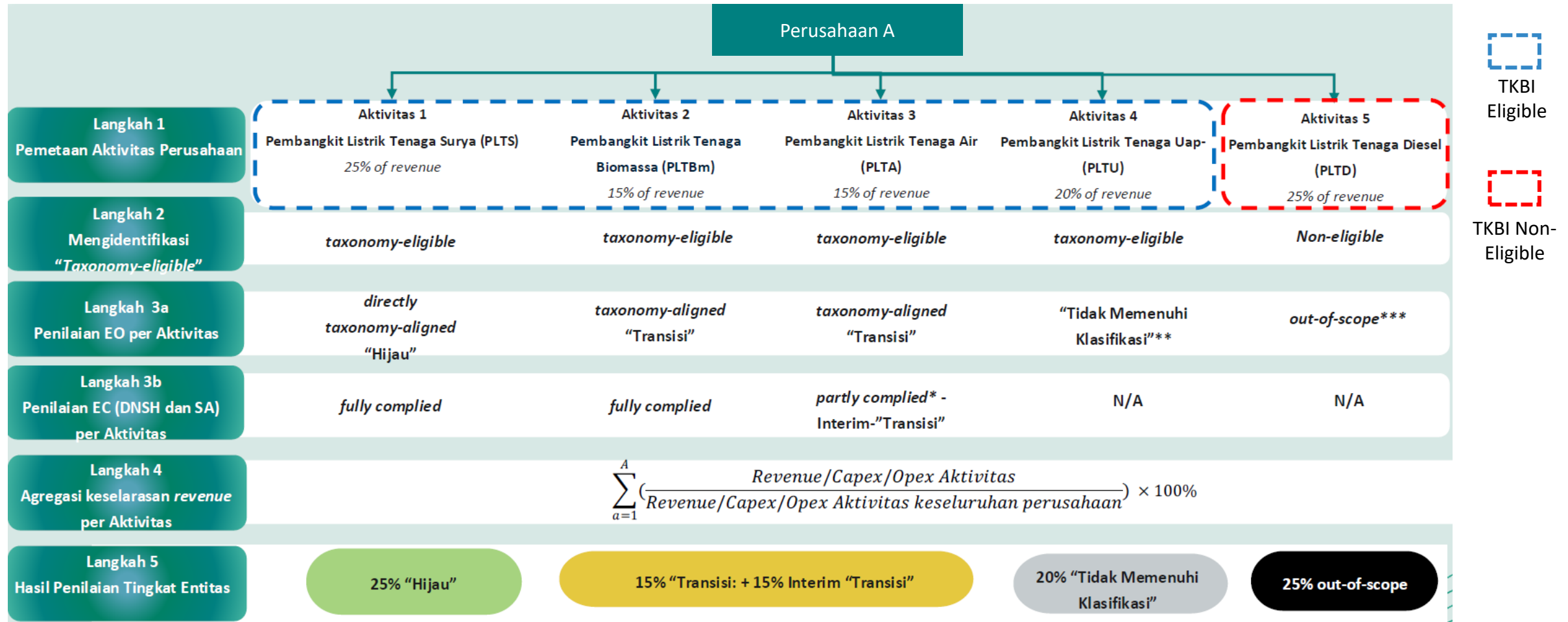
Yes

Yes

Transisi

Use Case Penilaian TKBI di Level Entitas

Perusahaan A yang bergerak di sektor energi memiliki 5 (lima) aktivitas yang berkontribusi terhadap proporsi yang berbeda dari keseluruhan pendapatan perusahaan



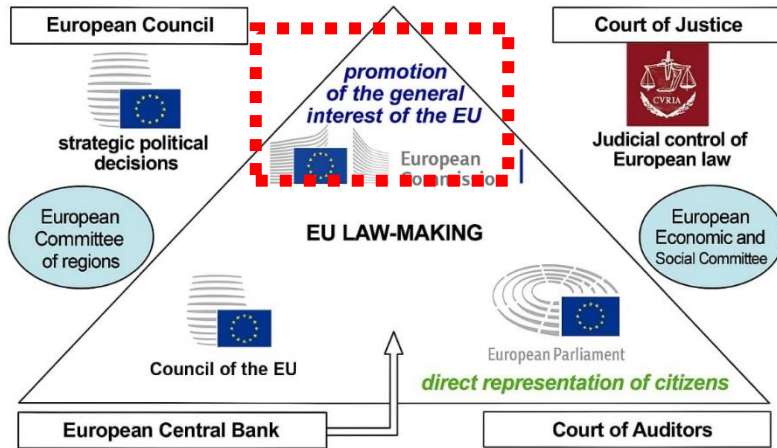
*) Aktivitas 3 belum memenuhi DNSH untuk semua EO, sehingga memerlukan RMT dalam waktu 3 tahun, sehingga klasifikasi interim "Transisi"

**) PLTU masuk dalam cakupan TKBI (TKBI-eligible/in-scope) dengan persyaratan ketat dan maksimum klasifikasi "Transisi". Dalam contoh ini Aktivitas 4 tidak memenuhi TSC EO1 untuk PLTU sehingga diklasifikasikan "Tidak Memenuhi Klasifikasi".

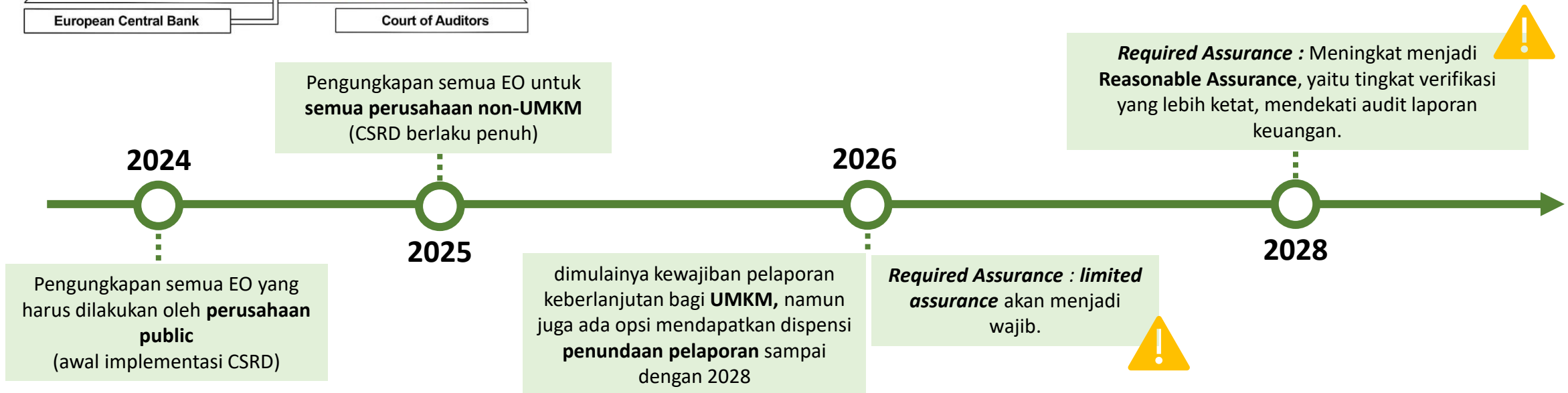
***) PLTD tidak masuk dalam cakupan TKBI (TKBI non-eligible/out of scope), karena sumber energi menggunakan bahan bakar fosil (solar), tidak masuk dalam taksonomi berkelanjutan global, dan dalam konteks nasional akan terdapat rencana transisi PLTD digantikan dengan PLT EBT.

Dalam Regulasi di Eropa, Transparansi Pembiayaan Berkelanjutan di bawah EU Taxonomy dan CSRD

A simple scheme of the EU institutional system



- ❑ EU *Taxonomy* dibuat oleh **European Comission** dan mulai berlaku pada 12 Juli 2020 dan menetapkan sistem klasifikasi di **seluruh EU** untuk aktivitas usaha yang mendukung keberlanjutan.
- ❑ Kewajiban pengungkapan terkait EU *Taxonomy* **berada pada tingkat perusahaan**, sebagaimana diatur dalam **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**. Melalui Pasal 19a dan 29a CSRD, **perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan informasi** mengenai sejauh mana aktivitas ekonomi mereka memenuhi kriteria keberlanjutan yang ditetapkan dalam EU *Taxonomy*.



Di Indonesia, Standar Pelaporan Keberlanjutan Mulai Diperkuat Melalui IFRS S1 & S2

IFRS S1 & S2 aim to provide consistent and comparable reporting standards

Information about asset, liabilities, equity, income and expenses

**Financial
Statements**

*Interlinked and
Reflected on
Annual and/or
Sustainability
Report*

**Sustainability
related
disclosures**

Information about sustainability risks and opportunities

Sustainability



IFRS S1

- Informasi tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan
- Semua risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dapat berdampak pada prospek perusahaan (arus kas, akses keuangan, biaya modal) jangka pendek, menengah, & panjang.

Climate



IFRS S2

- Mengintegrasikan rekomendasi TCFD.
- Digunakan sesuai dengan IFRS S1.
- Memerlukan pengungkapan informasi material mengenai risiko dan peluang terkait iklim.
- Mewajibkan pengungkapan khusus industri yang didukung oleh panduan tambahan berdasarkan SASB.



Governance

Strategy

Risk Management

Metrics & Targets

Adopsi IFRS S1 & IFRS S2 menjadi PSPK 1 dan PSPK 2 dirancang untuk mengintegrasikan informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan.



Desember 2024 – Maret 2025
Penerbitan draf eksposur dan tanggapan publik.

Q2 2025 – 2026
Penyusunan standar dan Pengkinian POJK 51/2017 – adopsi IFRS S1 dan IFRS S2.

1 Januari 2027
PSPK 1 dan PSPK 2 efektif diterapkan.



THANK YOU

ESG Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Bali, 4 Desember 2025